

PERILAKU MEMILIH BURUH ROKOK DALAM PILKADA LANGSUNG DI KABUPATEN KUDUS TAHUN 2008

Dicky Priambodo, NIM:D2B008099

ABSTRAKSI

The regional head and deputy regional head directly for the first time for the district Holy. The process of the election of the Holy regent and deputy regent has taken place on April 12 2008. Everyone knows, that is the Holy city of clove cigarette industry, a place where there are thousands of factories large and small cigarettes which give employment to the inhabitants. More than a hundred thousand people working in this sector. Most of them are as cigarette workers. The interesting thing is that in the This election their voices became seizure, even one candidate targeting him main, the pair Mansour As'ad and Agus Darmawan. This study aims to determine and identify the dominant factors affecting voter behavior cigarette workers in the implementation of direct elections in the Holy district. The process of data collection conducted through literature review, interviews, direct observation, then manage and analyzing the data with the results of a descriptive qualitative techniques. Based on the results of the study concluded that the first of the factors that affect voter behavior in elections Holy cigarette workers in 2008, the first row is a factor interpreter campaign or the campaign team. It is heavily influenced by the attitude of cigarette workers who tend to be passive in political activities, most of them are women, most of the time is used to work and they tend to not want to engage the conflict so that their voices of people who depend on surrounding.

The second factor is the political incentives or grants or whatever. It is very closely related with a pragmatic attitude, they lack confidence in whether the elections will bring changes to the future for the better. The third factor is the identification of a candidate, they will select candidates according to behavior is good news and want to come and visit the community down. The fourth factor is issue campaign or candidate's vision and mission. Vision Mission and campaign promises of candidates that are too long will not be read, remembered and understood by the workers, campaign promises are practical and can be billed if later elected more hit. The fifth factor is party identification, candidate of major parties such as PDI-P, Golkar, PKB and PPP has an influence as well known but solid party factor is more prominent, for they how the party would govern if care is not just incompetent. The sixth factor is the pressure group or pressure groups. Most of them are women and the lower class workers, who extremely susceptible to mobilization and pressure. At first, researchers consider the most pressure groups is the dominant union because the union chairman has a target, it turns out the workers are not afraid of dreaded union not a union but the company owner, while the owner of the company committed to neutral. Pressure groups are more dominant is the surrounding non-Sabet liberate their thinking and determine their own choice. Limited access to information and economy makes them easy mobilized.

Keywords: cigarette workers voting behavior, elections Jump, Holy District 2008

Latar Belakang

Pelaksanaan Pilkada di Kabupaten Kudus merupakan tonggak sejarah secara murni artinya dengan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung membuktikan bahwa demokrasi sudah tumbuh secara murni dilakukan di Kabupaten Kudus. Pilkada Kabupaten Kudus Tahun 2008 diikuti oleh empat pasangan yaitu:

1. H. Musthofa Wardoyo/H. Budiyo yang dicalonkan oleh PDI-P dan Partai Golkar,
2. H.M. Heru Fathoni, SP/Dr. Ngatmin Alimanda yang dicalonkan oleh Partai Demokrat (PD), Partai Nasional Indonesia

(PNI) Marhaenis, Partai Pelopor dan Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB),

3. Mansyur, SH/H. Agus Darmawan yang dicalonkan oleh Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Bintang Reformasi (PBR) dan Partai Perhimpunan Indonesia Baru (PPIB)
4. H.M. Amin Munadjat, M.Si/H. Akhwan, SH yang dicalonkan oleh Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Melihat peta pertarungan dalam Pilkada Kabupaten Kudus dan memprediksi siapa yang bakal menjadi pemenang awalnya cukup sulit untuk dilakukan. Namun setidaknya ada enam

variabel yang bisa dijadikan parameter, yaitu *pertama* faktor identifikasi calon (figur yang diusung), *kedua* juru kampanye/sabet, *ketiga* faktor isu kampanye/visi misi, *keempat* faktor insentif/hibah politik, *kelima* faktor identifikasi partai dan *keenam* faktor *pressure group* atau kelompok penekan. Hal ini terkait dengan seberapa jauh hal tersebut mempengaruhi perilaku pemilih buruh rokok dalam pemilihan kepala daerah tersebut. Melalui hasil Pilkada di Kabupaten Kudus kita berharap agar seleksi kepemimpinan yang dilakukan partai-partai oleh masyarakat yang selama ini hanya dipilih oleh sekian orang, dengan perubahan mekanisme pemilihan yang ada sekarang, bisa melahirkan pemimpin yang kredibel dan betul-betul untuk menjadi pemimpin yang dapat membangun dalam kualitas yang maksimal dan prima.

Pada pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah di Kabupaten Kudus yang berlangsung tanggal 12 April 2008, perilaku pemilih sangat sulit diduga, khususnya para buruh rokok di pedesaan. Sebagaimana diketahui Kabupaten Kudus dikenal sebagai daerah industri rokok, secara kasar dapat digambarkan bahwa jumlah pemilih di Kudus berdasarkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebanyak 572.353. dari keseluruhan jumlah pemilih terdaftar tersebut, jumlah pemilih terbanyak berada di Kecamatan Jekulo yaitu sebanyak 73.074 orang, dan jumlah pemilih terdaftar terendah berada di Kecamatan Bae yaitu sebanyak 47.190 orang. Sedangkan jumlah buruh rokok yang ada di Kabupaten Kudus sebanyak 110.000 orang. Apabila masing-masing buruh rokok membawa satu orang keluarganya saja maka akan diperoleh 220.000 suara atau 38,43 %, sebuah angka jaminan untuk memenangkan perebutan suara. Hal inilah yang sangat menarik perhatian para calon dan menjadi target mendulang suara, berbagai strategi telah disiapkan agar bisa menggaet orang-orang penting di perusahaan sehingga bisa membawa gerbongnya ke salah satu calon.

Salah satu calon yang sejak awal mengincar suara kaum buruh rokok adalah Mansyur As'ad, ayahnya Moh As'ad adalah ketua SPSI bidang RTMM (Rokok Tembakau Makanan dan Minuman) tingkat Kabupaten sekaligus Tingkat Propinsi dan Tingkat Pusat. Seorang tokoh SPSI RTMM yang sudah menjadi pengurus sejak puluhan tahun dan juga pengurus sepakbola (Persatuan Sepakbola

Kudus, disingkat Persiku) selama beberapa periode. Mansyur adalah pengurus SPSI di tingkat Jawa Tengah bidang Pengupahan. Berharap dengan posisinya itu semua kaum buruh rokok akan berada di genggamannya.

Strategi dimulai dengan menitiptkan Mansyur sebagai pengurus Partai Demokrat Kabupaten Kudus dan jabatan yang diperolehnya adalah sekretaris. Saat persiapan masa pencalonan Mansyur sebagai salah satu pengurus Partai Demokrat bermaksud untuk mencalonkan diri sebagai calon Bupati, lobi-lobi telah dilakukan termasuk menghadirkan Pengurus DPD Partai Demokrat Jawa Tengah, uang juga telah keluar banyak. Tapi ternyata ketua Partai Demokrat juga berniat mencalonkan diri sehingga terjadi perpecahan. Selanjutnya Mansyur berniat mencalonkan diri lewat PPP, kebetulan PPP juga sedang tidak solid karena pertentangan antara ketua DPC HJ. Maesyaroh dan MPC (Musyawarah Pimpinan Cabang), sejumlah dana telah dikeluarkan untuk rapat-rapat tetapi akhirnya PPP betul-betul pecah dan kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) dibekukan oleh Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Jawa Tengah.

Angin segar datang setelah adanya kabar dibolehkannya calon independen, menginspirasi Mansyur As'ad untuk menggunakan kekuatan massa buruh rokok untuk mendukung pencalonannya, namun karena peraturan pelaksanaannya belum ada dan tidak dapat segera terbentuk, Mansyur mengurungkan niatnya menggunakan jalur independen, saat itu stiker dan baliho Mansyur sebagai calon bupati juga sudah diluncurkan. Moh As'ad juga berhasil melobi Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang awalnya merencanakan hari pelaksanaan Pilkada dilaksanakan hari Minggu dirubah menjadi hari Sabtu. As'ad punya skenario, kalau Pilkada dilaksanakan pada hari Sabtu atau hari kerja maka para buruh rokok (buruh harian) sesuai dengan peraturan ketenagakerjaan akan dapat diusahakan mendapatkan premi (berupa uang pengganti upah sehari sebesar Rp. 21.000). Premi ini bisa keluar dan dibayarkan apabila ada kesepakatan oleh Tripartit (Serikat Pekerja, Dinas Tenaga Kerja dan Pengusaha). Apabila tidak ada tuntutan dari serikat pekerja yang punya *power*, maka premi inipun tidak akan bisa dibayarkan karena pengusaha pasti tidak akan dengan mudah mengeluarkan uang yang sedemikian banyak. Apabila dihitung

100.000 pekerja saja, maka harus dikeluarkan oleh pengusaha uang sebanyak Rp. 21.000 x 100.000 = Rp. 2.100.000.000 (dua milyar seratus juta rupiah). Setelah berhasil melobi KPU, As'ad juga berhasil melobi pengusaha dan Disnaker agar bisa dikeluarkan persetujuan Tripartit untuk membayarkan premi untuk hari sabtu saat Pilkada kepada semua buruh.

Mansyur As'ad bertambah keyakinannya untuk bisa mengendalikannya massa buruh. Keberhasilannya merubah hari Pilkada dari hari minggu ke hari Sabtu menambah keyakinannya untuk bisa mengandalkan jaringan serikat buruh khususnya buruh rokok. Setelah tidak jadi maju lewat jalur independen, Mansyur melakukan lobby-lobby untuk mencari kendaraan politik dari partai-partai dan membentuk koalisi. Upayanya berhasil dengan menggaet PAN yang bersedia menjadi wakil Bupati dan dua partai lain yang masing-masing mempunyai satu kursi di DPRD yaitu Partai Bintang Reformasi dan Partai Perhimpunan Indonesia Baru. Untuk dua partai yang punya masing-masing satu kursi tersebut harus dikeluarkan dana sekitar dua ratus lima puluh juta rupiah untuk masing-masing (yang merupakan satu paket dukungan meliputi dukungan formal yang merupakan syarat pencalonan, dukungan massa, dukungan juru kampanye termasuk hiburan saat kampanye).

Perjalanan semakin mantap karena secara formal jumlah syarat dukungan yaitu tujuh kursi DPRD telah terpenuhi. Program penggalangan massa pun dirancang, Tim kampanye dibentuk terdiri dari 9 orang. Secara umum target yang diharapkan masuk adalah kaum buruh rokok, massa PAN dan simpatisan yang digarap sehingga sampai jumlah tertentu. Dalam kegiatan penyusunan program penggalangan suara ini, mulai terlihat adanya ketidaksinkronan antara As'ad, tim kampanye dan Calon Wakil Bupati Agus Darmawan.

As'ad sebagai ketua SPSI sangat yakin bahwa suara kaum buruh rokok akan dapat diperoleh lewat struktur serikat pekerja. Dari kalangan buruh dikumpulkanlah para mandor, karena dianggap mereka inilah yang biasa mengawasi pekerjaan para buruh dan paling tahu identitas para buruh. Para mandor tersebut disosialisasi, dibayar dan ditugasi untuk mengawasi para buruh saat pencoblosan. Satu mandor bisa mengawasi sampai 100 orang, setiap hari sosialisasi menghabiskan dana sekitar lima belas juta rupiah.

Dalam kenyataan, kegiatan sosialisasi

tidak menyentuh langsung para buruh secara individu hanya sekedar sampai pada individu setingkat mandor. Para pejabat perusahaan di tingkat manajer juga ternyata telah punya hubungan dengan calon-calon yang berbeda karena walaupun bersifat pribadi. Hubungan antara mandor dengan pekerjanya ternyata tidak sekuat yang diduga. Dalam masalah ini pekerja tidak mau patuh pada ajakan mandor karena secara resmi perusahaan telah mengatakan bersifat netral. Kesetiaan para pekerja lebih kepada pemilik perusahaan bukan kepada yang lain.

SPSI di mata para buruh tidak lagi diterima positif sebagai pihak yang memperjuangkan para buruh bahkan sebagian keberadaan SPSI dianggap negatif karena iuran SPSI dianggap memotong gaji buruh. Memang mereka mengakui bahwa As'ad sering dapat menjembatani demo buruh rokok dengan pengusaha seperti beberapa kali terjadi di pabrik Jambu Bol, tetapi menurut mereka itu sudah seharusnya dan setiap kali dia menyelesaikan masalah dia pun akan mendapat imbalan yang tidak sedikit. Struktur dalam SPSI yang diajak bekerja pun tidak bekerja dengan motivasi tinggi ingin memenangkan calon dari pengurus SPSI, tetapi motivasinya lebih karena mencari keuntungan materiil sesaat dari calon, istilahnya "dipremi" (hal ini karena para pengurus dan karyawan di kantor SPSI juga mengetahui kalau As'ad juga biasa mendapatkan imbalan-imbalan dari pengusaha untuk mencapai keputusan-keputusan tertentu, imbalan-imbalan tersebut hanya mengalir ke kantong ketua saja sedangkan para pengurus pada level bawah tidak mendapat apa-apa). Usaha SPSI untuk mengusahakan premi pada hari pelaksanaan pilkada dianggap suatu hal yang wajar karena sesuai dengan peraturan ketenaga kerjaan. Para buruh menganggap uang premi bukan jasa dari As'ad karena uangnya adalah dari perusahaan.

Selain Tim Mansyur As'ad, calon-calon lain tidak ada yang masuk ke pabrik menemui para buruh. Calon yang punya basis massa sangat kuat seperti PDI Perjuangan dan Partai Kebangkitan Bangsa lebih memilih untuk memanfaatkan kabet-kabetnya di tingkat bawah, di desa bahkan di tingkat RT, mereka lebih mengandalkan penggalangan massa dari rumah ke rumah. Tetapi hasil Pilkada ternyata berbicara lain, pasangan nomor urut 1. H Musthofa Wardoyo/H Budiyo memperoleh suara 233.776 (43,88 persen), pasangan nomor

urut 2. HM Heru Fathoni/Ngatmin Alimanda memperoleh suara 18.340 suara (6,02 persen), pasangan nomor urut 3. Mansyur As'ad/H Agus Darmawan memperoleh suara 24.346 (7,99 persen), sedangkan pasangan nomor urut 4. HM Amin Munadjat/H Akhwan Sukandar memperoleh suara sebanyak 128.393 (42,11 persen) sisanya yang lain adalah suara tidak sah dan golput 18.683. Pilkada tersebut dimenangkan oleh pasangan nomor urut 1. H. Musthofa Wardoyo/H. Budiyo dengan 133.776 suara, sedangkan Mansyur As'ad/H. Agus Darmawan hanya menempati urutan ketiga dengan perolehan suara hanya 24.346. Suara itu pun kemungkinan sebagian besarnya adalah milik H. Agus Darmawan, Ketua DPC PAN Kabupaten Kudus.

Penelitian tentang perilaku pemilih buruh rokok di Kudus sangat menarik untuk dilaksanakan. Apa yang sesungguhnya mempengaruhi pilihan kaum buruh rokok dalam Pilkada Kudus tahun 2008. Apa yang menjadi sebab dan pengaruhnya. Hal inilah yang sangat menarik untuk diteliti. Karena berbagai keterbatasan, maka penelitian ini akan mengambil sampel hanya di tiga perusahaan rokok, yaitu PT. Djarum dan PT. Nojorono.

Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian tentang latar belakang di atas, maka masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan "Mengapa suara buruh rokok tidak diberikan pada Mansyur As'ad, selaku wakil ketua Serikat Pekerja Seluruh Indonesia di bidang rokok, tembakau, makanan, minuman?"

Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, tujuan penelitian ini adalah "untuk mendeskripsikan perilaku buruh rokok yang tidak memberikan suara pada Mansyur As'ad, selaku wakil ketua Serikat Pekerja Seluruh Indonesia di Bidang rokok, tembakau, makanan, minuman.

Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Dari hasil penelitian ini diharapkan akan memberikan sumbangan bagi ilmu pemerintahan khususnya yang berkaitan dengan perilaku pemilih buruh rokok dalam pilkada langsung di Kabupaten Kudus. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pengembangan

ilmu pengetahuan dan bahan kajian peneliti.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini disusun dalam bentuk karya ilmiah guna memenuhi salah satu syarat untuk persyaratan memperoleh gelar sarjana ilmu politik. Manfaat praktisnya yaitu memberikan kontribusi informasi bagi masyarakat, terutama masyarakat mengenai perilaku pemilih buruh rokok dalam Pilkada langsung di Kabupaten Kudus.

Kerangka Teori

Salah satu kajian dalam perilaku politik adalah perilaku memilih masyarakat dalam pemilu (dalam hal ini penulis dalam pemilihan kepala daerah), perilaku memilih adalah keikutsertaan warga negara dalam pemilu yang merupakan serangkaian tindakan membuat keputusan apakah memilih atau tidak memilih.

Pemahaman dalam perkembangannya, *voting behaviour* atau perilaku memilih yang digunakan untuk menjawab pertanyaan mengenai alasan mengapa seseorang memilih suatu kandidat atau kontestan terdapat beberapa pendekatan yang sering digunakan yaitu; pendekatan sosiologis, pendekatan psikologis, dan pendekatan rasional/ekonomi. Adapun dari beberapa pendekatan tersebut diatas penulis akan menyampaikan tiga pendekatan pokok digunakan dalam melihat perilaku memilih suatu masyarakat, pendekatan perilaku tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pendekatan Sosiologis

Telah dikemukakan bahwa struktur tertentu mempunyai kognisi sosial tertentu yang pada akhirnya bermuara pada perilaku tertentu. Kognisi yang sama antara anggota subkultur terjadi karena sepanjang hidup mereka dipengaruhi lingkungan fisik dan sosiokultural yang relatif sama. Mereka dipengaruhi oleh kelompok-kelompok referensi yang sama. Karena itu mereka memiliki kepercayaan nilai dan harapan yang juga relatif sama; termasuk dalam kaitannya dengan preferensi politik. Dengan pendekatan ini para anggota subkultur yang sama cenderung mempunyai preferensi yang sama pula.

Menurut mazhab Columbia pendekatan sosiologis pada dasarnya

menjelaskan bahwa karakteristik sosial dan pengelompokan sosial, usia, jenis kelamin, agama, pekerjaan, latar belakang keluarga, kegiatan-kegiatan dalam kelompok formal dan informal dan lainnya memberi pengaruh cukup signifikan terhadap pembentukan perilaku pemilih. Kelompok-kelompok sosial itu memiliki peranan besar dalam membentuk sikap, persepsi dan orientasi seseorang.

2. Pendekatan Psikologis

Pendekatan sosiologis tidak memuaskan semua pakar politik. Kelemahan pendekatan sosiologis antara lain terletak pada sulitnya mengukur secara tepat indikator kelas sosial, tingkat pendidikan dan agama secara materi patut dipersoalkan, apakah benar variabel variabel sosiologis seperti status sosial ekonomi keluarga, kelompok-kelompok primer dan sekunder itu memberi sumbangan pada perilaku pemilih jika ada proses sosialisasi. Untuk itu sosialisasi lah yang sebenarnya menentukan bukan karakteristik sosiologis. Karena kelemahan itu, muncul perilaku pemilih berdasarkan pendekatan psikologis, juga sering disebut madzhab Michigan. Pendekatan ini menggarisbawahi adanya sikap politik para pemberi suara yang menetap. Teori ini dilandasi oleh sikap dan sosialisasi. Sikap seseorang sangat mempengaruhi sikap politiknya. Sikap itu terbentuk melalui sosialisasi yang berlangsung lama, bahkan bisa ada sejak seorang calon pemilih masih berusia dini. Pada usia dini seorang calon pemilih telah menerima pengaruh politik dari orang tuanya, baik dari komunikasi langsung maupun dari pandangan politiknya yang diekspresikan orang tuanya. Sikap tersebut menjadi lebih mantap ketika menghadapi pengaruh berbagai kelompok acuan seperti pekerjaan, kelompok pengajian, dan sebagainya. Proses panjang sosialisasi itu kemudian membentuk ikatan yang kuat dengan partai politik atau organisasi kemasyarakatan lainnya.

Pendekatan ini menjelaskan bahwa sikap seseorang merupakan refleksi dari kepribadian seseorang yang menjadi variabel yang cukup menentukan dalam mempengaruhi perilaku politik seseorang. Oleh karena itu pendekatan psikologis menekankan pada tiga aspek psikologis

sebagai kajian utama, yaitu ikatan emosional pada suatu partai politik, orientasi terhadap isu-isu dan orientasi terhadap kandidat.

3. Pendekatan Rasional

Pada kenyataannya, sebagian pemilih mengubah pilihan politiknya dari satu pemilu ke pemilu lainnya. Peristiwa-peristiwa politik tertentu bisa saja mengubah preferensi pilihan politik seseorang. Komunikasi politik dengan substansi dan strategi yang tepat mungkin saja mempengaruhi pilihan seseorang. Perubahan ini meskipun harus melalui usaha yang keras, bukan hal yang mustahil.

Pendekatan rasional itu para pemilih benar-benar rasional. Para pemilih melakukan penilaian yang valid terhadap tawaran partai. Pemilih rasional itu memiliki motivasi, prinsip, pengetahuan dan mendapat informasi yang cukup. Tindakan mereka bukanlah faktor kebetulan atau kebisaaan, bukan untuk kepentingan sendiri melainkan untuk kepentingan umum, menurut pertimbangan dan pikiran yang logis. Pendekatan rasional, melihat bahwa pemilih akan menentukan pilihan berdasarkan penilaiannya terhadap isu-isu politik dan kandidat yang diajukan, artinya para pemilih dapat menentukan pilihannya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan rasional. Dengan demikian, perilaku pemilih berdasarkan pertimbangan rasional tidak hanya berupa memilih alternatif yang paling menguntungkan atau mendatangkan kerugian yang paling sedikit, tetapi juga dalam memilih alternatif yang menimbulkan resiko yang paling kecil yang penting mendahulukan selamat. Oleh karena itu, diasumsikan para pemilih mempunyai kemampuan untuk menilai isu-isu politik yang diajukan, begitu juga mampu menilai calon atau kandidat yang ditampilkan. Penilaian rasional terhadap isu politik atau kandidat ini dapat didasarkan pada jabatan, informasi, dan pribadi yang populer atas prestasi yang dimilikinya. Menurut Situngkir bahwa pendekatan rasional dilandasi oleh asas manfaat yang akan diperoleh pemilih. Secara sederhana pendekatan ini memilikilah langkah-langkah dalam menentukan pilihannya. Pertama,

kalkulasi keuntungan total yang diperoleh untuk masing-masing kemenangan kandidat bagi agen pemilih. Kedua, membuat urutan kandidat yang paling menguntungkan hingga yang paling tidak menguntungkan. Ketiga, menentukan pilihan pada yang paling menguntungkan.

Kabupaten adalah pembagian wilayah di bawah provinsi yang dipimpin oleh seorang kepala daerah/bupati. Selain kota yang dipimpin oleh seorang walikota. Secara umum, baik kabupaten maupun kota memiliki wewenang yang sama. Kabupaten bukanlah bawahan dari provinsi, karena itu bupati atau walikota tidak bertanggung jawab kepada gubernur. Kabupaten maupun kota merupakan daerah otonom yang diberi wewenang mengatur dan mengurus pemerintahannya sendiri. Meski istilah kabupaten saat ini digunakan diseluruh wilayah Indonesia, istilah ini dahulu hanya digunakan di pulau Jawa dan Madura saja. Pada era Hindia Belanda, istilah kabupaten dikenal dengan *regentchap*, yang secara harfiah artinya adalah daerah seorang *regent* atau wakil penguasa. Pembagian wilayah di kabupaten di Indonesia saat ini merupakan “warisan” dari era pemerintahan Hindia Belanda.

Dalam ketentuan umum Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Pasal 1 didefinisikan bahwa pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Provinsi dan atau Kabupaten atau Kota berdasarkan Pancasila dan UUD Negara RI Tahun 1945 untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Kepala daerah/Bupati merupakan pimpinan dari pemerintah daerah atau kabupaten. Alasan mengapa posisi kepala daerah menjadi sangat penting adalah berkaitan dengan sistem otonomi daerah yang dilaksanakan di Indonesia, bahwa posisi kepala daerah adalah strategis karena memegang kebijakan alokasi sumber daya daerah secara langsung, maka sangat penting dan perlu adanya perhatian khusus terhadap siapa yang memegang posisi dan memegang tanggung jawab sebagai kepala daerah. Oleh karena itu jaminan dan usaha bagi pemerintah daerah untuk melaksanakan pemerintah daerah yang baik dan bersih mutlak diperlukan. Salah satu usaha yang dilakukan yaitu dengan

memberikan hak kepada masyarakat untuk langsung memilih siapa yang pantas dijadikan kepala daerah melalui pemilihan kepala daerah secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Harapannya adalah dengan pemilihan kepala daerah secara langsung maka pertanggungjawaban kepala daerah tidak lagi DPRD, tetapi langsung kepada masyarakat sebagai konstituen yang memilihnya.

Operasionalisasi Konsep

Definisi konseptual yang dipakai dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut :

1. Perilaku Pemilih
 - a. Perhatian kaum buruh rokok terhadap kegiatan politik
2. Alasan-alasan yang mempengaruhi perilaku pemilih
 - a. Pendekatan sosiologis
 - 1) Demografi
 - 2) Sosial ekonomi
 - 3) Pekerjaan
 - 4) Latar belakang keluarga
 - b. Pendekatan psikologis
 - 1) Ikatan emosional pada suatu partai
 - 2) Orientasi terhadap isu-isu kampanye dan orientasi terhadap kandidat
 - c. Pendekatan rasional
 - 1) Identifikasi partai politik pengusung
 - 2) Identifikasi figur
 - 3) Kelompok penekan

Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif bersifat deskriptif, dengan demikian data yang terkumpul berbentuk kata-kata, gambar bukan angka-angka. Kalaupun ada angka-angka, sifatnya hanya sebagai penunjang dalam proses analisis data. Penelitian deskriptif dan melukiskan keadaan subjek atau obyek penelitian (lembaga, masyarakat, daerah) pada saat sekarang, yang mendasarkan faktor-faktor yang nampak atau sebagaimana adanya. Penelitian deskriptif bertujuan untuk mendeskripsikan secara terperinci fenomena sosial tertentu, misalnya interaksi sosial, sistem kekerabatan dan lain-lain. Moloeng mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai penelitian

yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian.

2. Fokus dan Lokus Penelitian

Penelitian ini dilakukan di perusahaan rokok, yaitu PT. Djarum dan PT. Nojorono di Kabupaten Kudus, dengan memfokuskan untuk mengetahui mengapa perilaku buruh rokok tidak memberikan suaranya pada Mansyur As'ad.

3. Informan

Informan yang dijadikan sumber penelitian ini adalah 1) Agus Istiarso sebagai buruh rokok SKM PT. Djarum; 2) Warsono sebagai buruh rokok SKM PT. Nojorono ;3) Chambali sebagai buruh rokok SKM PT Nojorono; 4) Dadang sebagai anggota tim sukses Mansyur As'ad/Agus Darmawan; 5) Mamak sebagai ketua tim sukses Mustofa W/H.Budiono; 6)Wawan sebagai ketua tim sukses Mansyur As'ad/Agus Darmawan

4. Instrument Penelitian

Dalam penelitian kualitatif, peneliti merupakan instrumen dalam penelitian. Dalam penelitian ini peneliti berkedudukan sebagai perencana, pelaksanaan pengumpulan data, analisis, penafsir data dan pada akhirnya ia menjadi pelapor hasil penelitiannya. Pengertian instrumen atau alat penelitian ini karena peneliti menjadi segalanya dari keseluruhan proses peneliti ini. Dalam hal pengumpulan data, digunakan *interview guide* untuk memandu pada saat wawancara berlangsung.

5. Sumber Data

a. Data Primer

Sumber data primer diperoleh dari personil yang mempunyai posisi kunci terhadap suatu peristiwa, fenomena yang di teliti, informan kunci tersebut adalah buruh rokok kebanyakan, Tim sukses dan para sabet, pimpinan serikat pekerja pabrik rokok, tokoh partai politik dan tokoh masyarakat.

b. Data Sekunder

Data yang diperoleh dari sumber kedua, atau tidak langsung, yang diperoleh dari dokumen seperti perundang-undangan, data dari KPU, referensi maupun catatan-catatan di

Kantor Pemerintahan Desa maupun Kantor Pemerintahan Kecamatan.

6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini berupa :

a. Wawancara Mendalam

Wawancara adalah suatu teknik pengumpulan data untuk mendapatkan informasi yang digali dari narasumber data langsung melalui percakapan atau tanya jawab.. Wawancara dalam penelitian kualitatif ini dilakukan secara mendalam untuk mendapatkan informasi secara *holistic*.

b. Observasi

Observasi adalah pengamatan terhadap suatu objek yang diteliti baik secara langsung maupun tidak langsung untuk memperoleh data yang harus dikumpulkan dalam penelitian. Secara langsung dalam hal ini untuk mendapatkan info dari buruh rokok yang tidak memberikan suaranya pada Mansyur As'ad sedangkan secara tidak langsung dapat diartikan dengan hanya melakukan pengamatan menggunakan alat bantu atau media visual atau audiovisual.

c. Metode Dokumentasi

Metode yang digunakan dengan cara mencari data mengenai hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, majalah, agenda dan sebagainya. Dokumentasi ini berfungsi sebagai metode pelengkap yang paling penting dalam penelitian ini terutama untuk mendapatkan data yang berkaitan dengan administrasi.

d. Study literatur

Selain teknik wawancara sebagai usaha untuk mendapatkan data primer, maka peneliti juga mencari bahan-bahan kepustakaan atau studi literatur atau studi terhadap buku-buku lainnya sepanjang ada hubungan dengan objek penelitian sehingga dapat menambah kevalidan data

7. Metode Analisis Data

Dalam penelitian ini metode analisis yang digunakan adalah *analisis data kualitatif*, yaitu suatu metode analisis yang digunakan untuk menganalisis data yang tidak dapat diterjemahkan dalam bentuk

angka atau hanya sedikit bersifat monografis sehingga tidak dapat disusun ke dalam suatu struktur klasifikasi. Analisis dilakukan dengan menguraikan informasi secara logis. Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data kedalam suatu pola tertentu. Tahapan analisis data dalam penelitian kualitatif ini, meliputi:

- a. Pengumpulan seluruh data
Dalam tahapan pengumpulan data, peneliti dituntut untuk mampu menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu dari wawancara, pengamatan lapangan, dokumen pribadi, dokumen resmi, gambar, foto dan sebagainya.
- b. Reduksi data
Langkah reduksi data dilakukan dengan cara melakukan abstraksi. Abstraksi merupakan usaha membuat rangkuman yang inti, proses, dan pernyataan-pernyataan yang perlu dijaga sehingga tetap berada di dalamnya.
- c. Penyajian data (*display data*)
Penyajian data merupakan proses penyusunan sekumpulan informasi atau data dalam satuan-satuan, yang kemudian dikategorikan sambil melakukan koding. Sehingga peneliti dapat menguasai data.
- d. Pengambilan keputusan atau verifikasi
Sejak semula peneliti berusaha mencari makna dari data yang diperoleh. Untuk itu peneliti berusaha mencari pola, model, tema, hubungan, persamaan, hal-hal yang sering muncul, hipotesis dan sebagainya. Verifikasi dapat dilakukan dengan singkat yaitu dengan cara mengumpulkan data baru. Dalam pengambilan keputusan, didasarkan pada reduksi data dan penyajian data yang merupakan jawaban atas masalah yang diangkat dalam penelitian ini.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Perhatian Kaum Buruh rokok terhadap Kegiatan Pemilu

Pada kasus penelitian ini yang dibahas adalah mengapa Mansyur As'ad

sebagai ketua SPSI tidak terpilih dalam Pemilu Calon Bupati dan Wakil Bupati Kudus Tahun 2008, padahal selaku Ketua SPSI dan saat itu berpasangan dengan Agus Darmawan (fungsiaris PAN DPD Kabupaten Kudus), seharusnya dapat memanfaatkan perolehan suara dari buruh pabrik rokok yang bertebaran di Kudus, buruh pabrik makanan dan minuman, serta dukungan dari kader dan simpatisan Partai Amanat Nasional (PAN), yang jumlah mencapai hampir 100 ribuan. Pada kenyataannya, hitungan di atas kertas tadi, pada kenyataannya meleset, sehingga pasangan Mansyur As'ad dan Agus Darmawan hanya menempati posisi nomor 3 dengan perolehan. Sebagaimana diketahui hasil Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kudus 2008 ternyata berbicara lain.

Dalam rangka memperoleh kemenangan dalam Pemilu, pasangan As'ad dan Agus Darmawan telah berupaya melakukan penggalangan pendukung mulai dari kalangan buruh yang dikumpulkan oleh para mandor, karena dianggap mereka inilah yang biasa mengawasi pekerjaan para buruh dan paling tahu identitas para buruh. Para mandor tersebut disosialisasi, dibayar dan ditugasi untuk mengawasi para buruh saat pencoblosan. Satu mandor bisa mengawasi sampai 100 orang, setiap hari sosialisasi menghabiskan dana sekitar lima belas juta rupiah. Namun pada kenyataannya, kegiatan sosialisasi tidak menyentuh langsung para buruh secara individu hanya sekedar sampai pada individu setingkat mandor. Para pejabat perusahaan di tingkat manajer juga ternyata telah punya hubungan dengan calon-calon yang berbeda karena walaupun bersifat pribadi. Hubungan antara mandor dengan pekerjanya ternyata tidak sekuat yang diduga. Dalam masalah ini pekerja tidak mau patuh pada ajakan mandor karena secara resmi perusahaan telah mengatakan bersifat netral. Kesetiaan para pekerja lebih kepada pemilik perusahaan bukan kepada yang lain. Loyalitas semacam ini akhirnya mempengaruhi keputusan kaum buruh rokok untuk menentukan pilihan yang tidak semata-mata kepada kandidat yang notabene merupakan elite dari organisasi

para buruh, karena secara sosiologis demografis SPSI bukan merupakan pemilik perusahaan di mana kaum buruh bekerja.

SPSI di mata para buruh tidak lagi diterima positif sebagai pihak yang memperjuangkan para buruh, bahkan sebagian keberadaan SPSI dianggap negatif karena iuran SPSI dianggap memotong gaji buruh. Memang mereka mengakui bahwa As'ad sering dapat menjembatani demo buruh rokok dengan pengusaha seperti beberapa kali terjadi di pabrik Jambu Bol dan Sukun, tetapi menurut mereka itu sudah seharusnya dan setiap kali dia menyelesaikan masalah dia pun akan mendapat imbalan yang tidak sedikit. Struktur dalam SPSI yang diajak bekerja pun tidak bekerja dengan motivasi tinggi ingin memenangkan calon dari pengurus SPSI, tetapi motivasinya lebih karena mencari keuntungan materiil sesaat dari calon, istilahnya "ipremi" (hal ini karena para pengurus dan karyawan di kantor SPSI juga mengetahui kalau As'ad juga biasa mendapatkan imbalan-imbalan dari pengusaha untuk mencapai keputusan-keputusan tertentu, imbalan-imbalan tersebut hanya mengalir ke kantong ketua saja sedangkan para pengurus pada level bawah tidak mendapat apa-apa). Usaha SPSI untuk mengusahakan premi pada hari pelaksanaan Pemilu di dianggap suatu hal yang wajar karena sesuai dengan peraturan ketenaga kerjaan. Para buruh menganggap uang premi bukan jasa dari As'ad karena uangnya adalah dari perusahaan.

Pada saat pemantapan kader dirasakan ada banyak kejanggalan dan hambatan, para mandor tidak sanggup untuk mengawasi pekerjaannya karena lokasi tempat tinggal para mandor tidak selalu dekat dengan tempat tinggal para pekerja selain itu para pekerja juga jumlahnya terlalu banyak dan tinggalnya terpecah-pecah.

2. Pendekatan yang dilakukan Mansyur As'ad dan Agus Darmawan.

Pendekatan Sosiologis

As'ad sebagai ketua SPSI sangat yakin bahwa suara kaum buruh rokok akan dapat diperoleh lewat struktur serikat pekerja. Dari kalangan buruh

dikumpulkanlah para mandor, karena dianggap mereka inilah yang biasa mengawasi pekerjaan para buruh dan paling tahu identitas para buruh. Para mandor tersebut disosialisasi, dibayar dan ditugasi untuk mengawasi para buruh saat pencoblosan. Satu mandor bisa mengawasi sampai 100 orang, setiap hari sosialisasi menghabiskan dana sekitar lima belas juta rupiah.

Dalam kenyataan, kegiatan sosialisasi tidak menyentuh langsung para buruh secara individu hanya sekedar sampai pada individu setingkat mandor. Para pejabat perusahaan ditingkat manajer juga ternyata telah punya hubungan dengan calon-calon yang berbeda karena walaupun bersifat pribadi. Hubungan antara mandor dengan pekerjanya ternyata tidak sekuat yang diduga. Dalam masalah ini pekerja tidak mau patuh pada ajakan mandor karena secara resmi perusahaan telah mengatakan bersifat netral. Kesetiaan para pekerja lebih kepada pemilik perusahaan bukan kepada yang lain.

Pendekatan Psikologis

Sesuatu yang dari semula tidak diperkirakan oleh pasangan As'ad dan Agus Darmawan adalah bahwa ternyata SPSI di mata para buruh tidak lagi diterima positif sebagai pihak yang memperjuangkan para buruh bahkan sebagian keberadaan SPSI dianggap negatif karena iuran SPSI dianggap memotong gaji buruh. Memang mereka mengakui bahwa As'ad sering dapat menjembatani demo buruh rokok dengan pengusaha seperti beberapa kali terjadi di pabrik jambu bol, tetapi menurut mereka itu sudah seharusnya dan setiap kali dia menyelesaikan masalah dia pun akan mendapat imbalan yang tidak sedikit.

Struktur dalam SPSI yang diajak bekerja pun tidak bekerja dengan motivasi tinggi ingin memenangkan calon dari pengurus SPSI, tetapi motivasinya lebih karena mencari keuntungan materiil sesaat dari calon, istilahnya "dipremo" (hal ini karena para pengurus dan karyawan di kantor SPSI juga mengetahui kalau As'ad juga biasa mendapatkan imbalan-imbalan dari pengusaha untuk mencapai keputusan-keputusan tertentu, imbalan-imbalan tersebut hanya mengalir ke

kantong ketua saja sedangkan para pengurus pada level bawah tidak mendapat apa-apa). Usaha SPSI untuk mengusahakan premi pada hari pelaksanaan pilkada dianggap suatu hal yang wajar karena sesuai dengan peraturan ketenaga kerjaan. Para buruh menganggap uang premi bukan jasa dari As'ad karena uangnya adalah dari perusahaan.

Pendekatan rasional

Sesuai de facto, selain Tim Mansyur As'ad, calon-calon lain tidak ada yang masuk ke pabrik menemui para buruh. Calon yang punya basis massa sangat kuat seperti PDI Perjuangan dan Partai Kebangkitan Bangsa lebih memilih untuk memanfaatkan kader-kadernya ditingkat bawah, di Desa bahkan di tingkat RT, mereka lebih mengandalkan penggalangan massa dari rumah ke rumah.

Kenyataan semacam ini semakin menguatkan keyakinan pasangan As'ad dan Agus, bahwa kubu kelompok buruh sepenuhnya masuk dalam kanting suaranya. Namun satu hal yang dari semua tidak diperkirakan dan disadari pasangan ini adalah suara kaum buruh rokok sudah terpecah atas dasar faktor pragmatisme politik.

Pada saat itu, untuk mengatasinya Tim As'ad-Agus menyarankan agar memakai jalur tenaga SPSI tetapi untuk memenangkan pertarungan di TPS. TPS yang dibidik cukup seperempat dari 1.074 TPS agar terjangkau, suara yang ditarget cukup 150.000 – 200.000 agar lebih efisien. Diperkirakan biayanya sekitar 3 milyar. Tetapi syaratnya Sabet yang berada di tingkat TPS harus dipersiapkan dengan matang, mereka nanti harus setor ke Tim, peta wilayah yang berhasil digarap di lingkup TPS-nya ini juga agar uang yang dibawa dapat dipertanggungjawabkan. TPS yang digarap juga harus TPS yang mengambang, bukan kandang calon lain. Cara ini diusulkan karena hasil survei secara acak ternyata suara buruh rokok sudah demikian terpecah. Tetapi cara ini tidak disukai oleh As'ad karena dianggap meragukan kemampuannya untuk mengendalikan para buruh rokok.

3. Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku pemilih buruh rokok dalam

Pemilukada Kudus Tahun 2008, berturut-turut adalah *pertama* faktor sikap buruh rokok yang cenderung pasif dalam kegiatan politik, sebagian besar mereka adalah kaum wanita, waktunya sebagian besar digunakan untuk bekerja dan mereka cenderung tidak ingin terlibat konflik sehingga suara mereka tergantung orang-orang yang ada di sekitarnya seperti suami, saudara atau tetangga atau yang dapat memanfaatkannya.

Di sini Tim Sukses harus bisa selalu memonitor perkembangan dan perubahan sikap konstituen yang menjadi targetnya, mengabarkan berita buruk dari calon lain dan mengcounter apabila ada berita jelek mengenai calonnya. Faktor *kedua* adalah insentif atau hibah politik atau apapun namanya. Hal ini sangat erat kaitannya dengan sikap pragmatis saja, mereka kurang percaya apakah Pemilukada akan membawa perubahan pada masa depan menjadi lebih baik, karena janji politik pada masa kampanye adalah hal yang biasa, besok setelah menjadi pejabat mereka akan mendapat uang yang banyak dari berbagai proyek dan upeti dari perusahaan-perusahaan besar, maka kalau saat kampanye mereka membagi-bagikan uang atau lainnya itu adalah hal yang wajar, mereka tidak menganggap itu *money politics* atau menjual suara tetapi seperti bantuan sosial, kepedulian terhadap masyarakat kecil atau lainnya. Kalau tidak memberikan apa-apa itu malah dianggap pelit.

Faktor *ketiga* adalah identifikasi calon, mereka akan memilih calon yang menurut kabar perilakunya baik dan mau turun dan berkunjung ke lingkungan masyarakat bawah, sebagian besar mereka belum pernah bertemu apalagi kenal dengan para calon, tetapi perbincangan di masyarakat tentang calon yang aktif berdialog dengan masyarakat sangat berkesan. Demikian juga sebaliknya sedikit saja kelemahan calon tertentu akan cepat berkembang tak terkendali karena informasinya hanya lewat perbincangan. Calon dari pengurus serikat pekerja mestinya punya keuntungan tersendiri karena sudah cukup dikenal tetapi kualitasnya justru sangat diragukan, dengan tidak adanya calon *incumbent*, maka masa pengenalan dari calon punya

waktu yang relatif sama.

Faktor *keempat* adalah isu kampanye atau visi misi calon. Visi Misi dan janji kampanye calon yang terlalu panjang tidak akan dibaca, diingat dan dimengerti oleh kaum buruh, janji kampanye yang praktis dan bisa ditagih kalau nanti terpilih seperti dana sosial kematian, akte lahir gratis, KTP gratis akan mudah diingat, mereka tidak bakal percaya janji yang terlalu muluk yang sulit untuk dijelaskan.

Faktor *kelima* adalah identifikasi partai, calon dari partai besar seperti PDIP, Golkar, PKB maupun PPP mempunyai pengaruh karena sudah dikenal tetapi faktor partai yang solid lebih menonjol, bagi mereka bagaimana akan memerintah kalau ngurus partainya saja tidak becus. Partai yang sedang tidak solid juga berpengaruh pada macetnya mesin partai.

Faktor *keenam* adalah kelompok penekan. Sebagian besar mereka adalah perempuan dan merupakan pekerja kelas bawah, yang sangat rentan pada mobilisasi dan tekanan. Pada mulanya penulis menganggap kelompok penekan yang paling dominan adalah serikat pekerja karena ketua serikat pekerja punya target, ternyata para pekerja tidak takut pada serikat pekerja yang ditakuti bukan serikat pekerja tetapi pemilik perusahaan, sedangkan pemilik perusahaan berkomitmen netral. Kelompok penekan yang lebih dominan adalah para sabet disekitarnya yang tidak membebaskan mereka berpikir dan menentukan sendiri pilihannya. Keterbatasan terhadap akses informasi dan ekonomi membuat mereka mudah dimobilisasi.

Implikasi

Berdasarkan hasil analisis teoretik dan pembahasan sebagaimana yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka terdapat dua ragam implikasi sebagai bagian akhir dari penelitian, yakni implikasi teoretik dan implikasi praktik. Pada tataran teoretik, implikasi penelitian ini berupa ketertarikan antara temuan teoretik dalam perilaku politik pemilih buruh rokok dengan teori-teori yang digunakan. Secara empirik, pada titik tertentu mengukuhkan teori yang ada pada titik selanjutnya sifatnya mengembangkan teori formal.

1. Implikasi Teoretik

Setelah mengetahui faktor kekalahan Mansyur As'ad dalam Pemilu Kudus Tahun 2008, serta pola perilaku politik pemilih buruh rokok dan berbagai faktor yang memengaruhinya sebagai dasar preferensi pemilih di Kabupaten Kudus, sebagaimana yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka analisis berikutnya dilanjutkan pada upaya penemuan model yang menjadi substansi dalam perilaku politik pemilih baik yang terimplementasi dalam pemberian suara maupun yang tidak memilih.

Tentu saja upaya menemukan konsepsi tentang makna perilaku politik pemilih buruh rokok dalam menentukan hak pilihnya berkaitan dengan seperangkat perspektif teoretis yang digunakan sebagai *starting point* dalam menganalisis hasil temuan dalam penelitian ini. Hasil penelitian sebelumnya pada umumnya hanya mengungkap konfigurasi pemberian suara organisasi peserta pemilu (OPP), tentu saja hal ini cukup beralasan. Pemilihan umum di masa Orde Baru sering dianggap hanya sebagai partisipasi semu (*pseudo participation*) yang oleh Huntington sebagai partisipasi yang dimobilisasi. Sehingga kedalaman makna politik di balik tindakan para pemilih tidak ditemukan. Letak substansi dari perilaku pemberian suara adalah apa sebenarnya yang mendasari seseorang dalam memberikan suaranya? Apakah seseorang yang tidak memilih dan yang memilih akan mendapat perlakuan kebijakan yang berbeda, tentu saja tidak, karena ketika pemerintah terpilih tidak lagi menjadi milik sebuah kelompok atau golongan, melainkan seluruh masyarakat secara keseluruhan.

Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan alasan mendasar pemilih dalam menentukan pilihan politiknya. Dari berbagai varian stimulus politik yang menjadi motivasi pemilih menentukan pilihannya, ternyata dapat disatukan oleh misi visi pemilih. itu sendiri. Faktor atau variabel yang dapat dijadikan sebagai kategorisasi pemilih pada pola yang sama adalah masalah waktu pencapaian tujuan. Berbagai varian stimulus politik yang ditemukan tampaknya hanya sekedar instrumen pencapaian tujuan, sehingga

model konfigurasinya tidak stabil atau tidak permanen. Orientasi waktu pencapaian tujuanlah yang menyebabkan adanya konfigurasi pemilih pada pola yang sama. Disadari atau tidak, manusia sebagai insan politik (*zoon politicon*) dalam aktivitasnya baik antara individu dengan individu lainnya, individu dengan kelompok, maupun antara kelompok dengan kelompok, senantiasa memiliki tujuan masing-masing. Dalam usaha mencapai tujuan tersebut, manusia terikat oleh nilai, norma, dan kaidah di mana mereka berinteraksi.

Durkheim melihat realitas ini sebagai fakta sosial, yang dimaksudkan untuk mengatur pola perilaku manusia. Lain halnya Weber, tindakan manusia sebagai sesuatu yang memiliki makna subjektif. Individu dipandang sebagai makhluk yang kreatif, sehingga mampu melakukan tindakan sesuai makna dan tujuan yang diinginkannya. Sementara itu, paradigma perilaku melihat perilaku atau tindakan manusia atas dasar stimulus dan respon. Pandangan behavioris dalam kehidupan politik terkait dengan proses sosialisasi masa lalu yang memungkinkan adanya perulangan (*reinforcement*) perilaku.

Dalam konteks penelitian ini, ketiga payung utama sosiologi di atas, perlu dielaborasi lebih jauh dalam melihat realitas perilaku politik pemilih buruh rokok dalam Pilkada langsung sebagaimana yang telah dipaparkan pada pembahasan sebelumnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perilaku politik pemilih buruh rokok dalam pemilihan secara langsung sangat kompleks dan relatif tidak permanen, sangat kondisional. Perilaku politik pemilih bukan merupakan realitas yang berdiri sendiri, tidak pula sebagai perilaku yang berada pada ruang hampa. Dengan lain perkataan, perilaku politik pemilih sangat berkaitan dengan stimulus dan pertimbangan subjektif dalam merespon faktor stimulus yang diperolehnya.

Sebagaimana karya Weber bahwa tindakan sosial merupakan tindakan penuh makna yang menjadi dasar atau orientasi tindakan individu. Dari orientasi tindakan tersebut dapat diklasifikasi berdasarkan kadar rasionalitas yang dikandungnya atau yang disebutnya sebagai *the degree of*

rationality.⁷² Weber menyatakan bahwa suatu tindakan rasional terjadi ketika seorang mencoba untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu dengan melakukan seleksi pada cara-cara (*means*) yang dinilai tepat untuk mewujudkannya sesuai dengan situasi yang ada. Tindakan rasional merupakan metode pencapaian tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya dengan menggunakan cara yang diperhitungkan lebih tepat. Dengan begitu, sintesa teoritis yang didasarkan pada realitas *locus* penelitian menunjukkan bahwa, perilaku politik pemilih buruh rokok di Kabupaten mencirikan model diakronik, yaitu rasionalitas perilaku pemilih dengan mempertimbangkan jarak waktu pencapaian tujuan.

Derajat rasionalitas tersebut, tersusun dalam tiga rentang waktu, yakni rasionalitas retrospektif, rasionalitas pragmatis-adaptif, dan rasionalitas prospektif. Model rasional retrospektif, yaitu kemampuan pemilih untuk memilih berdasarkan penilaiannya pada penampilan kontestan pada masa yang lalu, walaupun dalam pilkada ini tidak ada calon *incumbent* tetapi perilaku partai, caleg maupun pejabat yang mengingkari janji adalah hal yang biasa. Perilaku memilih retrospektif (*retrospective voting*) tidak ubahnya seperti memberikan ganjaran atau hukuman kepada kontestan. Pemilih memberikan ganjaran jika ia merasakan adanya perbaikan terhadap nasibnya dan kepentingannya selama masa berkuasa sang kontestan. Sebaliknya, pemilih akan memberikan hukuman berupa memilih kontestan lain atau bahkan tidak memilih (Golput), jika dirasakannya nasib dan kepentingannya tidak berubah atau bertambah buruk. Rasionalitas retrospektif diarahkan pada figur dan partai politik, khususnya kepada calon yang berasal dari pengurus serikat pekerja yaitu Mansyur As'ad.

Rasionalitas yang kedua adalah rasionalitas pragmatis-adaptif dan level inilah yang banyak digandrungi pemilih oportunistis. Tipe rasionalitas ini didasarkan atau disesuaikan pada stimulus politik yang muncul pada momen pemilihan. Pragmatis adaptif disebabkan oleh beberapa hal, seperti politik uang dan termasuk memilih posisi aman dari

kelompok penekan. Politik uang dalam berbagai bentuk manifestasinya, mempunyai pengaruh yang sangat besar dalam membentuk pragmatisme politik. Politik uang sebagai bentuk pragmatisme politik tidak selalu dalam arti pemberian sejumlah uang kepada pemilih, tetapi juga dalam bentuk-bentuk yang agak *soft* agar tidak terkesan membeli suara (*buying voters*).

Perilaku pragmatisme-adaptif muncul akibat pesimisme masa depan dan janji kampanye yang sekadar "isapan jempol" akhirnya mendorong pemilih menjadi pragmatis (*pragmatic voting*). Belum lagi adanya anggapan, siapa pun yang berkuasa tidak akan mampu melakukan perubahan signifikan. Rasionalitas model ini tidak mengikuti tradisi model prospektif (masa depan) dan tidak pula di dasarkan pada model retrospektif (pandangan masa lalu). Melainkan sifatnya fleksibel dan kondisional. Dengan lain perkataan model pragmatis-adaptif, yaitu perilaku pemilih yang diorientasikan pada waktu sekarang, pemilih hanya semata melihat kepentingan sesaat.

Rasionalitas politik pemilih baik yang terimplementasi sebagaimana pola 1 (memilih) maupun perilaku politik yang mengikuti pola 2 (Golput) merupakan perilaku yang dapat berubah-ubah sewaktu-waktu. Karena itu, domain pertimbangan utamanya sangat ditentukan oleh tujuan dari tindakan para pemilih. Perilaku politik yang didasarkan pada waktu pencapaian tujuan inilah yang disebut dengan rasionalitas diakhronik. Secara metodologis, rasionalitas diakhronik bertindak sebagai variabel antara (*intervening variables*). Stimulus politik yang berupa identifikasi figur, identifikasi partai politik, isu kampanye, juru kampanye, dan *pressure groups* tidak secara langsung memengaruhi perilaku politik pemilih, melainkan terlebih dahulu melewati atau melalui variabel antara yakni visi misi pemilih yang menjadi pertimbangan utama dalam mencapai tujuan politiknya yang dalam penelitian ini disebut sebagai rasionalitas diakhronik.

Rasionalitas diakhronik yang dimaksudkan penulis sejalan dengan pandangan Lasswell tentang makna perilaku politik seseorang. Dalam

ungkapannya menyebutkan, "*politics is who get what, when, and how*" (politik adalah siapa memperoleh apa, kapan, dan bagaimana). Dari ungkapan tersebut, Ia menjelaskan dua hal penting yaitu: (1) perilaku politik selalu berorientasi pada nilai atau berusaha mencapai tujuan. Nilai dan tujuan tersebut, dibentuk oleh proses perilaku yang sesungguhnya merupakan suatu bagian, dan (2) perilaku politik bertujuan menjangkau masa depan dan senantiasa memperhatikan kejadian masa lalu. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pola perilaku politik pemilih dalam pemilihan secara langsung terdiri atas pola perilaku pemilih yang memberikan hak suaranya dan pola perilaku pemilih yang tidak memberikan hak suaranya (Golput). Pola perilaku tersebut, dikonstruksi atau dipengaruhi oleh enam varian stimulus politik, yakni faktor juru kampanye/tim sukses/ sabet, isu kampanye, insentif/hibah politik, identifikasi figur, identifikasi partai, dan adanya tekanan dari *pressure groups*.

Rasionalitas perilaku politik pemilih yang dimaksud, terbagi atas tiga segmen rasionalitas, yakni meliputi rasionalitas prospektif, rasionalitas pragmatisadaptif, dan rasionalitas retrospektif. Dari ketiga segmentasi rasionalitas perilaku politik pemilih buruh rokok di Kabupaten Kudus, merupakan perpaduan dari segmentasi retrospektif yang meliputi identifikasi figur, juru kampanye dan partai politik, rasionalitas pragmatis yang meliputi varian insentif/hibah politik dan kelompok penekan. Sementara segmentasi rasionalitas prospektif juga telah cukup kuat yaitu penilaian atas janji kampanye atau visi misi calon.

2. Implikasi Praktik

Menyikapi model perilaku pemilih buruh rokok yang masih sangat sarat dengan perilaku retrospektif dan pragmatis utamanya menyangkut realitas kapitalisme Pilkada, maka ada beberapa saran yang dapat menjadi kontribusi praktis dalam penelitian ini, sebagai berikut:

a. Bagi Penegak Demokrasi

Perlunya secara bersama-sama meningkatkan kesadaran politik kaum buruh dengan pendidikan politik yang sehat agar ia lebih memahami hak-haknya dan pentingnya menggunakan

- hak-hak politiknya untuk mewujudkan masa depan bangsa yang lebih baik.
- b. **Bagi Partai Politik**
 Kondisi kehidupan para buruh yang lemah, perlu diperjuangkan secara nyata agar menjadi lebih sejahtera, adanya perlindungan akan hak-hak pekerja, tambahan ketrampilan dan peningkatan pengetahuan, tidak malah menjadi mangsa empuk untuk dijadikan objek mendukung suara murah dan mudah. Jangan biarkan mereka lemah. Partai Politik yang berada di lingkungan masyarakat yang sebagian besar terdiri dari para buruh pabrik sebaiknya memasukkan dalam programnya agenda yang akan dilakukan untuk konsumsi para buruh pabrik, melindungi kaum buruh, memperjuangkan kelangsungan dan kemajuan perusahaan agar para buruh bisa tetap bekerja serta pendidikan dan bantuan alternatif bagi kaum buruh yang rentan terhadap PHK. Memberikan perhatian akan kelangsungan hidup perusahaan dan kemajuan perusahaan harus juga dilakukan secara seimbang dengan perlindungan kaum buruh, hal ini kelihatannya masih kurang diperhatikan sehingga ada persepsi bahwa pemerintah dan partai politik hanya cenderung mengejar keuntungan dari adanya pabrik tersebut, memelototi kalau ada pabrik yang berkembang dan memperoleh untung besar, mencari sumbangan, sponsor dan lain sebagainya.
- c. **Bagi Serikat Pekerja**
 Pandangan kaum buruh bahwa serikat pekerja sebagai pemotong gaji buruh harus dirubah. Serikat Pekerja harus mereformasi diri, tidak lagi menjadikan kaum buruh sebagai objek tapi menjadikan kaum buruh sebagai subjek gerakan dan kegiatan serikat buruh. Pengurus Serikat Buruh sendiri perlu memperbaiki sistemnya agar lebih transparan sehingga tidak dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu untuk mencari keuntungan pribadi, misalnya melakukan nego-nego tertentu dengan pengusaha.

- d. **Bagi Penyelenggara Pilkada**
 Agar dapat dibuat suatu sistem yang fair agar informasi mengenai pentingnya partisipasi dalam pemilu/pilkada yang sehat sampai pada para buruh yang waktunya sangat terbatas, juga pengetahuannya sangat minim serta rawan terhadap intimidasi dan mobilisasi. Hal itu berarti butuh waktu sosialisasi yang cukup, atas peran serta semua komponen yang terkait dengan penyelenggaraan Pilkada tidak hanya KPUD tapi juga Pemerintah. Peran para pengusaha yang cenderung netral dalam hal ini memberikan peluang yang baik bagi penyelenggara pilkada untuk mempermudah pelaksanaan tugasnya.

Daftar Pustaka

Buku Bacaan

- Adman Nursal. (2004). *Political Marketing: Strategi Memenangkan Pemilu*. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Ahmad Taufiq. (2006). *Pendidikan Agama Islam: Pendidikan Karakter Berbasis Agama*. Yuma Pustaka. Surakarta.
- Arifin, Anwar. (2011). *Komunikasi Politik*. Graha Ilmu. Yogyakarta.
- Ariyuno Suyono (1985). *Kamus Antropologi*. Penerbit PT. Pressindo Jakarta
- Daniel N.Posner dkk. (2007). *Mobilizing versus Chasing: How do Parties Target Voters in Election Campaigns”? Electoral Studies*. Politics and Public Policy Research Paper. Harvard University.
- Donald Parulian. (2003). *Pemilu 2004 dan Konsolidasi Demokrasi*. LP2IS Press. Semarang.
- Doni Hendrik. (2003). *Indonesia dan Komunikasi Politik*. PT. Gramedia. Jakarta.
- EM. Zul Fajri dan Ratu Aprillia Senja. (2002). *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Difa Publisher. Jakarta.
- Fadillah Putra. (2003). *Partai Politik dan Kebijakan Publik*. Universitas Muhammadiyah Malang. Malang.
- Iskandar Syah. (2008). *Marketing Politik antara Pemahaman dan Realitas Budaya*, Yayasan Obor Indonesia. Jakarta.

Ivan A. Hadar. (2004). *Utang, Kemiskinan dan Globalisasi: Pencarian Solusi Alternatif*, Laperia, Yogyakarta.

Kantaprawira, Rusadi. (2003). *Sistem Politik Indonesia*. Penerbit Sinar Baru. Bandung.

Lexy J. Moleong, (2004). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT. Remaja Rosdakarya. Bandung.

Masri Singarimbun dan Sofian Effendi. (2000). *Metode Penelitian Survey*. LP3ES. Jakarta.

Miriam Budiardjo. (2002). *Dasar-dasar Ilmu Politik*. PT. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.

Payung Bangun.(1998). *Dari Medan Ke Sapirook Area*, Yayasan Merga Silima. Jakarta.

Ramlan Surbakti. (2002). *Memahami Ilmu Politik*. PT. Gramedia Widiasarana Indonesia. Jakarta.

Schultz & Lavenda. (2001). *Political Communication and Public Opinion in America*, Goodyear Publishing, Co. New York.

Subana (Ed). (2005). *Metodologi Penelitian Kualitatif, Aktualisasi Metodologis ke Arah Ragam Varian Kontemporer*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.

Sugiyono. (2009). *Metodologi Penelitian Administrasi*. Penerbit Alfabeta, Bandung.

Widagdo, H.B. dkk. (2001). *Manajemen Pemasaran Parpol Era Reformasi*. PT. Golden Terayon Press. Jakarta.

Wiyono, R. (2002). *Organisasi Kekuatan Sosial Politik di Indonesia*. Alumni. Bandung.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang *Pemerintah Daerah*

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2002 tentang *Partai Politik*

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2010 tentang *Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD..*

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 100 Tahun 2003 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD.

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 636 Tahun 2003 tentang Perubahan Terhadap Keputusan KPU No.100 Tahun 2003 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD.

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 701 Tahun 2003 tentang Kampanye Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD.